



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT/ FGD KLHS REVISI RTRW KABUPATEN KEBUMEN Tahun 2011-2031

Kebumen 4 Oktober 2018

AGENDA KEGIATAN HARI INI

ACARA :

1. Tahap Kegiatan KLHS Ke-1 → Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

TUJUAN :

Menentukan **Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas**

METODE :

- Pasal 8 Ayat (2) PP No. 46 Tahun 2016 → dilakukan dengan **MENGHIMPUN MASUKKAN** dari **MASYARAKAT** dan **PEMANGKU KEPENTINGAN MELALUI KONSULTASI PUBLIK**,

TARGET HASIL KEGIATAN :

- **Daftar Panjang isu Pembangunan Berkelanjutan** untuk selanjutnya ditelaah bersama untuk menentukan **Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas**

ILUSTRASI IDENTIFIKASI ISU PB

Identifikasi Isu PB:

1. Isu PB didapat dari studi literatur dll oleh Tim Penyusun KLHS
2. Didiskusikan dengan Para Pemangku Kepentingan melalui Konsultasi Publik
3. Hasil Konsultasi Publik dituangkan dalam Berita Acara
4. Hasil Konsultasi Publik menjadi dasar untuk Isu PB Yang Paling Strategis

Identifikasi Isu PB Yang Paling Strategis:

1. Hasil pemusatan Isu BP, dianalisis dengan Ps 9 (1) PP 46;
2. Hasilnya dasar untuk menentukan Isu PB Prioritas

Identifikasi Isu PB Prioritas:

1. Hasil PB Yang Paling Strategis diuji pembobotan dengan Ps 9 (2) PP 46;
2. Minimal ada 3 isu

ILUSTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

3

Membentuk 3 kelompok kerja sesuai dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yaitu :

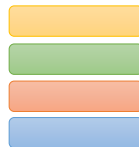
1. Ekonomi
2. Lingkungan
3. Sosial Budaya

Menelaah Daftar Panjang yang telah dihimpun sebelumnya untuk dikelompokkan sesuai dengan masing-masing tema

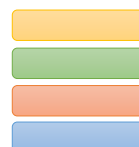
TEMA LINGKUNGAN



TEMA EKONOMI



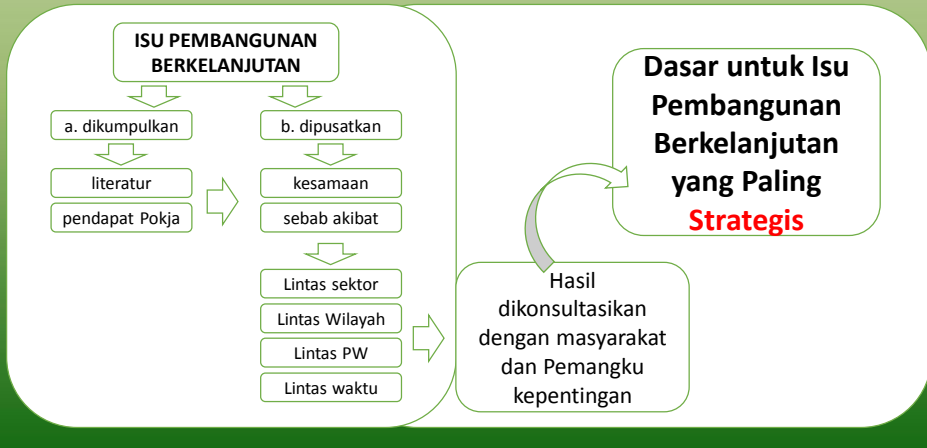
TEMA SOSIAL-BUDAYA



ILUSTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

3

Perumusan ISU pembangunan Berkelanjutan



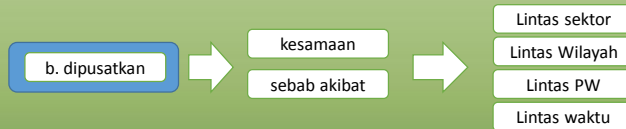
Kriteria Strategis (Permendagri 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS)

1.	Bersifat lintas wilayah (potensi dampaknya lebih luas dari wilayah perencanaannya (Lingkup Provinsi Jawa Tengah atau Nasional))
2.	Bersifat lintas sektor (antar pemangku kepentingan)
3.	Berdampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan: ○ Berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan ○ Berdampak mengganggu penerapan konsep pembangunan berkelanjutan
4.	Potensi dampaknya kumulatif dan berefek ganda

ILUSTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

4

Perumusan ISU pembangunan Berkelanjutan STRATEGIS



No	Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB)	Deskripsi Singkat Isu Panjang (Kesamaan Sebab Akibat)	Rumusan Isu PB
ISU SOSIAL			
1	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar	1. Masih banyak rumah yang belum menikmati listrik dan fasilitas air bersih yang layak konsumsi. 2. Keterbatasan sarana dan prasarana wilayah. 3. Pengembangan infrastruktur di pulau terluar. 4. 5.	Kesenjangan Antar Wilayah akibat terbatasnya sarana dan prasarana CONTOH

ILUSTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

4

Penetapan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

Melakukan penapisan dari Isu Pembangunan Berkelanjutan dengan **4 Kriteria Strategis**.

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Penjelasan	Lintas Sektor	Lintas Wilayah	Lintas Pemangku Kepentingan	Lintas Waktu	Penilaian
Isu Sosial							
1	Kesenjangan antar wilayah yang disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana kondisi geografis wilayah	✓ Kesenjangan merupakan isu lintas sektor yang meliputi sektor sosial, ekonomi dan infrastruktur ✓ Kesenjangan antar wilayah disebabkan oleh tidak meratanya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di setiap wilayah ✓ Penanganan kesenjangan wilayah membutuhkan koordinasi dan keterlibat semua pemangku kepentingan yang ada	✓	✓	✓	✓	4

ILUSTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Base Line Data Terkait Isu PB Strategis. Yang menjelaskan 6 unsur di Dalam PP NO 46 Tahun 2016 (Ps 9 ayat 1)

1. Karakteristik Wilayah
2. Tingkat Pentingnya Potensi Dampak
3. Keterkaitan Antar Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan
4. Keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
5. Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki diatasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau relevansi langsung.

Pasal 8 : Isu Pembangunan Berkelanjutan Yang Paling Strategis:

Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis dilakukan dengan cara;

Menelaah hasil isu PB dengan mempertimbangkan unsur-unsur:

Isu PB	Karakteristik Wilayah			Pentingnya dampak		Isu PB terkait	KRP terkait	RPPLH	KLHS diatas nya
	RBI	RTR	LC	Luas	Sering				
Banjir?	Topografi	Pola ruang	Terbuka ?	Luas?	Tiap tahun?	Analisis sebab akibatnya	Lokasinya sama?	Sudah ada rencana pengelolaanya ?	Sudah ada penanganan dari KLHS pada hirarki KLHS di atasnya?
Longsor?	Kelerengn	Struktur ruang	Hutan?	Kecil?	Baru terjadi?		Potensi pengaruhnya ?		
Kekeringan?	Diatas permukaan laut?		Tubuh air?						
Alih fungsi kawasan?	Sempadan?		Karst?						

Melalui konsultasi Publik, disepakati Isu yang akan diambil menjadi **Isu PB yang Paling Strategis** dengan mempertimbangkan hasil telaahan tersebut

ILUSTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

5

Telaah Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis dengan **mempertimbangkan 6 unsur** yang tercantum di dalam **Pasal 9 Ayat 1 PP No. 46**

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Karakteristik Wilayah	Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan Antar Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterkaitan dengan Materi Muatan KRP	RPPLH	Keterkaitan Dengan KLHS Lainnya
1.	<u>Adanya Kawasan Rawan Bencana</u>	<u>Merupakan wilayah kepulauan di kawasan pesisir sering terjadi peningkatan intensitas bencana abrasi yang mengancam permukiman masyarakat di kawasan pesisir.</u>	<u>Dampak yang terjadi akibat abrasi jika tidak segera ditangani akan semakin meluas dan mengganggu kehidupan masyarakat!</u>	<u>Berkaitan dengan isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis lainnya.</u>	<u>Terkait dengan muatan KRP :</u> 1. <u>Tujuan</u> 2. <u>Kebijakan</u> 3. <u>Strategi</u> 4. <u>Rencana Struktur Ruang</u> 5. <u>Rencana Pola Ruang</u> 6. <u>Rencana Kawasan Strategis</u> 7. <u>Arahan Pemanfaatan Ruang</u> 8. <u>Dan Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang</u>	<u>Belum Ada Kajian</u>	<u>Keterkaitan dengan KLHS Provinsi, terkait dengan KLHS RPJMD Provinsi</u>
2.	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>
3.	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>

CONTOH

ILUSTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

6

Penentuan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas dengan **mempertimbangkan 10 unsur** yang tercantum di dalam **Pasal 9 Ayat 2 PP No. 46** dan selanjutnya dilakukan skoring

Penjelasan 10 Unsur Muatan Pasal 9 Ayat 2.

No	Isu PB	Muatan									
		Kapasitas DRTLH	Dampak dan Resiko LH	Kinerja Jasa Ekosistem	Bencana Alam	Mutu SDA	Ketahanan KEHATI	Adaptasi Perubahan Iklim	Kemiskinan	Kesehatan	Kawasan Adat
1.	<u>Kawasan Bencana Alam</u>	<u>Kejadian bencana alam akan menyebabkan degradasi lingkungan</u>	<u>Bencana alam yang terjadi secara terus menerus akan merusakkan lingkungan hidup</u>	<u>Bencana alam akan mempengaruhi terhadap jasa ekosistem air dan pangan</u>	<u>Penurunan kualitas lingkungan yang ada akan menyebabkan bencana alam</u>	<u>Ketersediaan air akan berkurang akibat dari bencana alam</u>	<u>Bencana alam yang terjadi akan berdampak negative terhadap keberlanjutan ketahanan KEHATI yang ada</u>	<u>Pembangunan yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan dan yang ada</u>	<u>Bencana alam yang terjadi terus menerus dapat mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat</u>	<u>Kualitas kesehatan masyarakat akan menurun akibat seringnya terjadi bencana alam.</u>	-
2.	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>
3.	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>	<u>Dst.</u>

CONTOH

Skoring 10 Unsur Muatan Pasal 9 Ayat 2.

Pembobotan skoring dilakukan dengan skala 1-5, dengan keterangan :

- 1 = tidak berpengaruh
- 2 = kecil berpengaruh
- 3 = sedang berpengaruh
- 4 = cukup berpengaruh
- 5 = sangat berpengaruh

No	Isu PB Paling Strategis	Muatan										Total
		Kapasitas D3TLH	Dampak dan Resiko LH	Kinerja Jasa Ekosistem	Bencana Alam	Mutu SDA	Ketahanan KEHATI	Adaptasi Perubahan Iklim	Kemiskinan	Kesehatan	Kawasan Adat	
1	<u>Kawasan Rawan Bencana</u>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	46
2	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>
3	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>
4	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>
5	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>	<u>Dst..</u>

SEKIAN DAN TERIMA KASIH